



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024 – 8311172 Faksimile 024 – 8311172
laman <http://www.jatengprov.go.id>
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Oktober 2022

Nomor : 400.1/1554
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pernyataan BPKAD atas Monev
Keterbukaan Informasi Publik
Tahun 2022

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menindaklanjuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah turut berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud sebagai komitmen BPKAD Provinsi Jawa Tengah selaku Badan Publik dalam melaksanakan amanat Undang-Undang.

Guna menjawab beberapa pertanyaan dalam kuesioner Monev KIP Tahun 2022 tersebut, Kami selaku Ketua PPID BPKAD Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban: “ **NIHIL** ” pada pertanyaan sebagai berikut:

No. Urut	Jenis	Pertanyaan		Penjelasan
		Nomor	Uraian	
1.	Kualitas Informasi	1.b.	Badan Publik memiliki Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi	Semua informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas BPKAD terbuka untuk umum
		1.d.	Badan Publik telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka	
2.	Komitmen Organisasi	2.c.	Bukti kegiatan pelaksanaan penanganan keberatan informasi publik	Belum ada masyarakat pengguna layanan yang mengajukan keberatan informasi
			Bukti kegiatan pelaksanaan fasilitasi keberatan informasi publik	
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	B.1.	KAK	Paket pekerjaan yang dicontohkan tidak wajib menyusun KAK, gambar rancangan pekerjaan, melakukan studi kelayakan, dan
		B.9.	Gambar rancangan pekerjaan	
		B.10.	Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup termasuk analisis mengenai dampak lingkungan	

No. Urut	Jenis	Pertanyaan		Penjelasan
		Nomor	Uraian	
		B.13.	Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham	memiliki lisensi/ sertifikat
		B.16.	Berita Acara sanggah dan sanggah banding	Tidak ada paket pekerjaan yang dilakukan secara lelang/ tender
		B.20.	Surat Perjanjian Kemitraan	Perjanjian dilakukan cukup menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja) atau SP (Surat Pesanan)
		B.21.	Surat Perjanjian Swakelola	
		B.22.	Surat Penugasan atau surat pembentukan tim swakelola	
		B.23.	Nota kesepahaman atau memorandum of understanding	
		C.4.	Surat jaminan pelaksanaan	Tidak diwajibkan menyediakan Surat Jaminan karena Pengadaan Langsung
		C.5.	Surat jaminan uang muka	
		C.6.	Surat jaminan pemeliharaan	
		C.8.	Surat pesanan e-purchasing	Dua paket yang dicontohkan tidak melalui e-Purchasing
		C.11.	Laporan pelaksanaan pekerjaan	Tidak diwajibkan untuk paket dibawah 200 juta
		C.12.	Laporan penyelesaian pekerjaan	
		C.13.	Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan	
		C.14.	Berita Acara serah terima sementara atau provisional hand over	

Demikian untuk menjadikan periksa. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS



RUDI NUSROHO, SE, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19700524 199603 1 003